

**MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh**

**AHMAD BELLA BAHREN**

**NPM : 1441040122**

**Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

**MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi



**Pembimbing I : Hepi Reza Zen, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Mubasit, S.Ag.,MM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

### **MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**

**Oleh**

**AHMAD BELLA BAHREN**

Manajemen (*management*) yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali merugikan perempuan dan anak sebagai korban, sehingga dibutuhkan lembaga yang mewadahi pengaduan dan penanganan korban kekerasan supaya tidak berlanjut tragis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan manajemen konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan data penelitian yang berhasil penulis kumpulkan, setelah dilakukan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hasil manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran lampung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan konseling yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung adalah menggunakan pendampingan secara psikologis serta pendampingan secara advokasi.

Faktor pendukung dalam kegiatan penelitian ini yakni penanganan komprehensif secara intern dan ekstern, sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya manusia dalam pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak yang masih kurang, serta fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim dalam menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya dari perilaku diskriminasi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

**Kata kunci** : Manajemen Pelayanan Konseling, Korban KDRT.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat : Jl. Detkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

**Nama Mahasiswa :** Ahmad Bella Bahren

**NPM :** 1441040122

**Jurusan :** Bimbingan Konseling Islam

**Fakultas :** Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 17 Desember 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Hedi Reza Zen, S.H., M.H.**

**NIP. 19521214 197105 1 001**

**Mubasit, S.Ag., MM**

**NIP. 19731114 199803 1 002**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam**

**Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos. I**

**NIP. 19720921 199880 3 2002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung”**, yang disusun oleh: **Ahmad Bella Bahren, NPM. 1441040122, Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam**, Telah diujikan dalam sidang Munasqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada: Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Desember 2018

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I**

**Sekretaris : Zulkarnain, M.Kom.I**

**Penguji Utama : Eni Amaliah, S.Ag.,SS.,M.Ag**

**Penguji Pendamping I: Hedi Reza Zen, SH.,MH**

**Penguji Pendamping II: Mubasit, S.Ag.,MM**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**

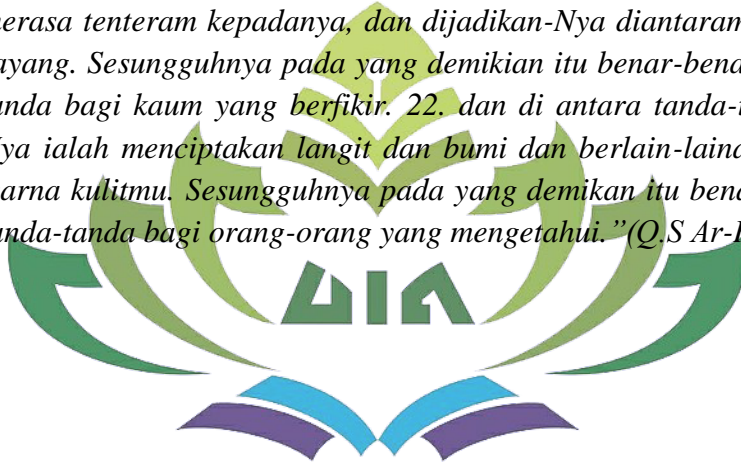
**NIP.196104091990031002**



## MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَاقِمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya : “21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 22. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Ar-Ruum Ayat 21-22)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada;

1. Kedua orangtua tercinta, Alm. Ayahanda Suhaili Bahri serta Ibunda Suanah, S.Pd, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi, mencintai dengan tulus, mendoakan tanpa putus rasa lelah, memberikan semangat kepada saya agar saya sabar dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakak Febrian Fikri, S.T dan Kakak Zel Gusrial Rais, S.Pd yang tidak pernah lelah mengarahkan, menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kakak Ipar Melisa Fikri dan Kakak Winda Shofie Aliyu S.Pd. serta keponakanku tersayang Cindikia Rizki Ramadhan, Ratu Maula Zafira, Bilyan Cahya Rais, dan Harumni Rais terimakasih karena selalu mendoakan serta mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Indah Dwi Aulia, S.Pd, yang tak lelah mensupport, mendoakan dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Hapi Reza Zen, SH.,MH dan Bapak Mubasit, S.Ag.,MM yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan ku khususnya angkatan 2014 jurusan BKI A.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ahmad Bella Bahren dilahirkan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran pada Tanggal 15 Juli 1996. Anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Alm. Bapak Suhaili Bahri dan Ibu Suanah, S. Pd.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari jenjang sekolah dasar di SD Negeri 2 Banjar Negeri lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTs Negeri Gunung Rejo Way Lima lulus pada tahun 2011, selanjutnya melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di MA Negeri Kedondong lulus pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan strata satu dan penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling dan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahamat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
3. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Ibunda Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I, dan Sekretaris Jurusan BKI Bapak Mubasit, S.Ag.,MM serta seluruh Dosen yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Pembimbing I Ibunda Hepi Reza Zen, S.H.,M.H dan Pembimbing II Bapak Mubasit, S.Ag.,MM Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Binarti Bintang, S.Sos.,M.IP selaku Kepala Dinas di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung yang telah memberikan izinnya, Bapak Sobari, S.K.M.,M.M selaku Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan penanganan kasus serta Semua tim Relawan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung.
6. Alm. Ayah dan Mama yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayangnya dalam setiap langkah sehingga penulis bisa mencapai harapan dan cita-cita.
7. Sahabat-sahabatku Dewi Wulandari, Bela Nadya Fiska, Shega Oktaviana, Anggun Sholeha, Emi Agustini, Arif Rahman, Agus Riyanto dan Fariko Adisa terimakasih karena telah mensupport dan mendukung saya.
8. Dosen serta staf jajarannya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
9. Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta para staf dan jajarannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para



pembaca pada umumnya sertasemua pihak-pihak yang peduli terhadap masalah-masalah sosial di keluarga dan masyarakat.

Bandar Lampung, Desember 2018

Ahmad Bella Bahren

NPM. 1441040122



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	5
C. Latar Belakang .....	5
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
 <b>BAB II. PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT .....</b>	 <b>23</b>
A. Manajemen Pelayanan .....	23
B. Konseling .....	25
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling .....	25
2. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling .....	27
3. Proses Layanan Konseling .....	30
4. Indikator Keberhasilan Konseling .....	36
5. Kegiatan Pendukung Konseling .....	36
6. Konseling Dalam Islam .....	38
C. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	40
1. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	40
2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	42
3. Gejala-gejala Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	44
4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	44
5. Dampak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	46
6. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	48
D. Pendampingan Psikologi dan Pendampingan Advokasi .....	51
E. Tinjauan Pustaka .....	53



**BAB III. DESKRIPSI UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG .....56**

- A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....56
  - 1. Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....56
  - 2. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....57
  - 3. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung.....58
  - 4. Struktur Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....67
- B. Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung dan Realisasinya .....68
  - 1. Program Kegiatan.....68
  - 2. Realisasi Hasilnya .....69
- C. Mekanisme Alur Pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung.....71
- D. Gambaran Keseluruhan Klien/Konseli Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....73
- E. Metode Pendampingan Kasus Pada Korban dan Pelaku KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung.73

**BAB IV. MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG .....75**

- A. Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....75
- B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Manajemen Pelayanan Konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung .....80

**BAB V. PENUTUP .....84**

- A. Kesimpulan .....84
- B. Saran.....85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Perempuan Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran .....	73
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran .....	82
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung .....	82
4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran .....	83





## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi .....	67
2. Alur Pendampingan Korban.....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1. Dokumentasi Penelitian di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung
- Lampiran2. Surat Keterangan Judul Skripsi dan Penunjukan Pembimbing dari Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
- Lampiran3. Kartu Konsultasi
- Lampiran4. Daftar Hadir Munaqosyah
- Lampiran5. Pedoman Wawancara Penelitian di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung
- Lampiran6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bandar Lampung
- Lampiran7. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran
- Lampiran8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung
- Lampiran9. Data Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh pengertian yang jelas dan menghindari penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul “Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung”, maka penulis memberikan penegasan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Pelayanan

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Menurut George R. Terry menjelaskan pula bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*), yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Menurut Johnson pelayanan adalah sebagai program dan tindakan yang memperkerjakan pekerja-pekerja sosial yang profesional dan berkaitan serta diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup> Pendapat Romanyshyu memberikan arti bahwa pelayanan sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial

---

<sup>1</sup> Malayu SP. Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 4

<sup>2</sup> Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : Rafika Aditama, 2012), h. 50

individu-individu dan keluarga-keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung dan proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga untuk mengatasi tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.<sup>3</sup> Sedangkan definisi pelayanan yang sangat mudah dijelaskan oleh Ivancevich bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.<sup>4</sup> Manajemen pelayanan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengelolaan dalam memberikan pelayanan yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

## 2. **Konseling**

Kata konseling (*Counseling*) berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselum*, artinya “bersama” atau “bicara bersama”. Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor (*counselor*) dengan seseorang atau beberapa client (*counselee*).<sup>5</sup> Konseling didefinisikan sebagai pemberian bantuan kepada client oleh konselor yang ahli. Sedangkan pengertian konseling dalam skripsi ini adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>4</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

<sup>5</sup> Latipun. *Psikologi Konseling*. (Malang : UMM Press, 2011), h. 3

pemberian bantuan atau pendampingan kepada client oleh konselor untuk mengatasi masalah yang dialaminya sesuai dengan kebutuhannya.

### **3. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. Adapun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Jadi, yang dimaksud perempuan korban kekerasan rumah tangga dalam skripsi ini adalah seorang istri yang mengalami tindak kekerasan di dalam suatu rumah tangga, berupa kekerasan fisik dan psikis/mental. Sedangkan anak korban kekerasan rumah tangga dalam skripsi ini adalah anak yang mengalami tindak kekerasan di dalam suatu rumah tangga, berupa penelantaran tanpa diberikan nafkah oleh ayah.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1



#### **4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Pesawaran Lampung**

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Pesawaran Lampung adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Pesawaran berlokasi di Jalan Suhada Bagelen IV Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung. SMS Center/Telp : (0852)-73171200.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud secara keseluruhan judul : “Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung” adalah suatu penelitian mengenai pengelolaan pelayanan yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) dalam memberikan bantuan atau pendampingan oleh konselor kepada istri yang mengalami KDRT berupa kekerasan fisik, psikis/mental, dan anak korban KDRT yang berupa penelantaran tanpa diberikan nafkah oleh ayah di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Tindakan KDRT merupakan suatu perbuatan yang merugikan perempuan khususnya istri sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan dari sebuah Pernikahan dan Kaidah serta Norma-norma dalam Agama dan Sosial Masyarakat.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) telah banyak berkontribusi bagi masyarakat dalam membantu dan menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat yakni Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Serta penelitian ini relevan dengan tersediannya literatur, data lapangan dan tempat bagi peneliti dalam menunjang keberhasilan penelitian tersebut serta sesuai dengan kajian Bimbingan dan Konseling Islam.

## **C. Latar Belakang**

Hampir setiap hari media massa memberitakan kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Dari rakyat biasa, pejabat pemerintah dan artis telah banyak yang mengalami atau melakukan tindakan kekerasan. Bentuk kekerasannya pun beragam, ada yang dipukul, ditendang, dijambak, diteror, diperkosa, maupun ditelantarkan tanpa diberi nafkah. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang harus mereka penuhi dan saling hormati, islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat mengekang dan merampas hak-hak istri, karena islam mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang. Dalam setiap ikatan

pernikahan para suami agar selalu menyayangi istri-istrinya mereka dan bergaul dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” [QS(4:19)]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bergaul istri dengan cara yang patut adalah memperlakukan istri dengan baik dengan tutur kata dan sikap yang baik. Cara yang patut yang dimaksud adalah dengan bersahabat yang baik, dengan tidak menyakiti istri, serta berbuat baik kepadanya. Termasuk dalam bergaul dengan cara yang baik adalah memberikan nafkah dan member pakaian yang layak. Firman Allah SWT tentang cara memperlakukan istri dengan baik pula disampaikan dalam QS. An-Nisaa' ayat 34, sebagai berikut :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” [QS(4:34)]



Dalam ayat diatas disebutkan cara yang baik dalam memperlakukan istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehati, lalu mendiamkan (tidak diajak bicara atau menghajer) jika menasehati tidak diindahkan, jika masih tidak mempan barulah dipukul. Memperlakukan istri berbeda dengan memperlakukan pria, karena istri di ciptakan dari tulang rusuk dan sifatnya seperti itu pula. Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anh*, Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda;

*“Berbuat baiklah pada para wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya (dengan kasar), engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Maka berbuat baiklah pada para wanita”.*

Kejadian sebuah kasus yang tragis dan menyayat hati ketika sebuah keluarga seharusnya melindungi dan menjaga kehormatan keluarga, malah menodai anggota keluarganya karena hawa nafsu. Dalam media massa menyiarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh salah satu artis tanah air yaitu Natali Margaret. Natali mengalami kekerasan berupa pemukulan oleh suami, hingga wajahnya dihajar. Selain mendapat kekerasan fisik, Natali juga mendapatkan semburan kata-kata kasar oleh sang suami. Selain kekerasan pada perempuan, terjadi pula kekerasan pada anak-anak. Salah satunya, kasus yang terjadi kepada seorang siswi SMK asal Ngawi yang berumur 15 tahun yang mengalami pemerkosaan oleh 4 orang pelaku. Pelaku pemerkosaan tiga

diantaranya adalah keluarga dekat korban, yaitu ayah kandung, paman, keponakan dan pacar korban. Korban saat ini tengah hamil tiga bulan.

Kekerasan pada perempuan banyak dijumpai baik itu di depan umum maupun dalam lingkungan keluarga. Kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin hari semakin meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orang tua, saudara bahkan pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluarga pun dapat menjadi korban KDRT, namun hampir dalam setiap penelitian tentang kekerasan dan kekuasaan, perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak negatif bagi korbannya khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri, baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, saat membuka rapat teknis antar Unit Pelayanan Penanganan Pengaduan Se-Jabodetabek tahun 2015 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat Menyebutkan;

“Komnas Perempuan dalam catatannya menyebut total kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai 279.760 kasus pada tahun 2013. Tiga provinsi teratas yang memiliki catatan terbanyak terhadap perempuan adalah DKI Jakarta dengan 2.881 kasus, Sumatra Utara 2.023 kasus dan Jawa Barat sebanyak 1.846 kasus. Sementara tahun 2014, total angka kekerasan terhadap perempuan Indonesia dari data Komnas Perempuan meningkat menjadi 293.220 kasus. Data kekerasan terhadap

anak yang dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 1408 kasus”.<sup>7</sup>

Anak adalah permata hati dan penyejuk mata kedua orang tuanya. Pada setiap kehadirannya disambut dengan bahagia, bagi para orang tua mengasuh anak merupakan pengalaman manis, yang tidak akan terlupa, melihat anak menjadi orang yang berguna adalah suatu kebanggan. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomer 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan”.<sup>8</sup>

Dengan adanya suatu pelayanan, maka diperlukan manajemen untuk mengatur dan mengarahkan peningkatan kualitas pelayanan. Alasan pertama perlunya manajemen adalah semua aktivitas sebuah lembaga (bahkan bila lembaga itu berupa usaha yang ditangani seorang diri) di semua lini mengarah pada tujuan dan pencapaian tujuan tersebut selalu diharapkan berkualitas.

---

<sup>7</sup> Rini Friastutu. “Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Selalu Meningkat Tiap Tahun”. <http://news.detik.com/berita/3035792/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-selalu-meningkat-tiap-tahun>. diakses pada tanggal 03 September 2018 pada pukul 11:28 WIB

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo. Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Sosial Work Jurnal* Vol 6 No 1, h. 81



Alasan kedua adalah bahwa lembaga membutuhkan keterlibatan manusia dan sumber daya lain (dalam jumlah besar) untuk mencapai tujuan. Sumber daya, apalagi dalam jumlah besar perlu dikelola secara berkualitas sehingga dinamika lembaga efisien dan efektif.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung. Lembaga ini memberikan layanan konseling sebagai upaya pemberian bantuan kepada masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Layanan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu (anak, remaja, atau dewasa) agar mampu mengembangkan potensi dirinya.<sup>10</sup>

Adanya komitmen dari P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung untuk menggali lebih dalam mengenai pengelolaan layanan konseling yang terdapat di lembaga tersebut.

---

<sup>9</sup> Fajar Santoadi. *Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2010), h. 7

<sup>10</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 19

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada uraian latar belakang masalah yang dipaparkan, maka perlu adanya sebuah pengarahannya masalah yang mendalam dari pengajuan judul proposal ini, maka penulis memandang penting untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasannya konsisten dan tidak melebar dari fokus kajian yang diteliti, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT ?
2. Apakah yang Menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelayanan Manajemen Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

## B. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang proses pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT secara psikologis.
2. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan dorongan dan semangat bagi para calon konselor agar dapat memberikan yang terbaik pada client/korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagi masyarakat dan korban, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban KDRT.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>11</sup> Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 4.

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Sumadi Suryabrata penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekaraang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, maka dapat disebut penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>12</sup> Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.<sup>13</sup> Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat secara korelasi, komparatif, dan kasus.<sup>14</sup> Menurut Cholid Nabuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 80.

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2013), h. 38.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 121.



ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata “apabila penelitian bermaksud untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu maka penelitiannya bersifat deskriptif “. <sup>16</sup> Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh Kriteria tertentu. <sup>17</sup> . Adapun *Suharsimi Arikunto* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. <sup>18</sup> Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas

---

<sup>15</sup> Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 4.

<sup>16</sup> Suharsimi, *Op.Cit.*, h. 75.

<sup>17</sup> Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, *Op.Cit.*, h. 121.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 173.

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>19</sup>

## 2. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah “Sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>20</sup>

Kemudian jenis sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling Non Random sampling, dimana peneliti menentukan pemilihan sekelompok sampel subjek didasarkan pada cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan sesuai dan mempunyai sangkut paut erat dengan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis akan menjelaskan secara rinci kriteria-kriteria masing-masing sample diatas sebagai berikut, Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sample diatas adalah:

1. Korban KDRT yang sedang menerima maupun yang telah memperoleh pelayanan pendampingan psikologis yakni secara konseling intensif dan bertemu secara langsung dengan konselor tenaga pendamping psikologis.

---

<sup>19</sup> Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, *Op.Cit.*, h. 107.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h. 173.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 116.

2. Kepala kordinator program, bersedia secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data peneliti.
3. Pekerja sosial yang berpengalaman dan sebagai konselor yang professional dalam mengkonseling serta memahami Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT.
4. Staf devisi penanganan kasus di damar yang membantu memberikan data-data terkait kelembagaan.

Berdasarkan ketentuan kriteria diatas maka sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 6 orang, yang terdiri dari kepala koordinator P2TPA 1 orang, konselor 1 orang, dan 1 orang staf devisi penanganan kasus di P2TPA, serta 3 orang client korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung. Jumlah keseluruhan sample sebanyak 6 orang.

#### C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, maka penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi.

##### 1. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode observasi dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Observasi berperan serta (*Participant observation*)

Dalam proses observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b) Observasi Non-partisipan

Jika dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen saja.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi *Op.Cit.*, h. 170

<sup>23</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi *Op.Cit.*, h. 176



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi *Non Partisipan* (sebagai pengamat) sebagai metode pokok untuk memperoleh data sebagai berikut:

1. Program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran.
2. Aktivitas Konseling yang dilakukan seorang konselor ahli di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran.
3. Media atau sarana yang digunakan dalam Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran.



## 2. Metode *interview* (Wawancara)

Metode *interview* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang memanifes.<sup>24</sup>

- a. Subyek (Responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar apa adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- c. Interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto *interview* adalah “metode penyimpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian”.<sup>25</sup> Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa *interview* atau wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara sebagai pengumpul data terhadap narasumber sebagai responden secara langsung

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 217.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 98.

untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan. Metode *interview* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Interview* terpimpin
2. *Interview* tak terpimpin
3. *Interview* bebas terpimpin<sup>26</sup>

Adapun metode *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *interview* terpimpin yaitu metode *interview* yang menggunakan pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian namun iramanya diserahkan kepada kebijakan pewawancara. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *interview* terpimpin sebagai metode pelengkap dari metode pokok untuk memperoleh data secara sekunder, yaitu untuk mengetahui perasaan orang lain, pengalaman, apa yang menjadi ingatannya bagaimana motivasi dan emosi yang dikehendaki, maka jalan yang tepat adalah bertanya kepada orang lain.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan lain

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, h. 132.

sebagainya”.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Keadaan jumlah pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran
- b. Dokumentasi-dokumentasi dari program kerja pegawai atau kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran
- c. Struktur organisasi atau kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran

#### D. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.<sup>28</sup> Jadi, karena data yang akan dianalisa merupakan data kualitatif, yang mana cara menganalisanya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga dapat disimpulkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang

<sup>27</sup>Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 97

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Op.cit.*, h. 209.

kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.





## BAB II

### MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Manajemen Pelayanan

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Menurut George R. Terry menjelaskan pula bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan (*Planning*) adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.<sup>1</sup> Pengorganisasian (*Organizing*) adalah proses kegiatan menyusun sktruktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.<sup>2</sup> Penggerakan (*Actuating*) adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki suatu kondisi atau keadaan.<sup>3</sup> dan pengawasan (*Controlling*) adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diterapkan

---

<sup>1</sup> Perencanaan, (online) di

<https://www.google.com/search?q=perencanaan+adalah&oq=perencanaan&aqs=chrome..69i57j0l2j69i65j0l2.4844j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

<sup>2</sup> Pengorganisasian, (online) di

<https://www.google.com/search?q=pengorganisasian&oq=pengorg&aqs=chrome..69i57j0l5.6737j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

<sup>3</sup> Penggerakan, (online) di

<https://www.google.com/search?q=pergerakan+adalah&oq=pergerakan+adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.6120j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut<sup>4</sup>, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Menurut Johnson pelayanan adalah sebagai program dan tindakan yang memperkerjakan pekerja-pekerja sosial yang professional dan berkaitan serta diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Pendapat Romanysyhu memberikan arti bahwa pelayanan sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui sumber-sumber sosial pendukung dan proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga untuk mengatasi tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.<sup>7</sup> Sedangkan definisi pelayanan yang sangat mudah dijelaskan oleh Ivancevich bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.<sup>8</sup> Manajemen pelayanan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengelolaan dalam memberikan pelayanan yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

---

<sup>4</sup> Pengawasan, (online) di

<https://www.google.com/search?q=pengawasan+adalah&oq=pengawasan+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4750j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

<sup>5</sup> Malayu SP. Hasibuan. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 4

<sup>6</sup> Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : PT Rafika Aditama, 2012), h. 50

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>8</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

## B. Konseling

### 1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Pada hakikatnya manusia membutuhkan pengenalan diri dan lingkungannya. Karena persyaratan untuk diterima masyarakat bukan hanya dari kematangan fisik, melainkan juga mental psikologis, cultural, vokasional, intelektual, dan religious. Dari kebutuhan tersebut menuntut untuk diselenggarakan Bimbingan dan Konseling. Pelayanan konseling dilaksanakan dari manusia, untuk manusia. Dari manusia artinya pelayanan ini diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Bimbingan secara umum dapat diartikan berada dalam bentuk pendidikan, bimbingan mengandung layanan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan siapa saja yang dapat dibantu, bimbingan tegasnya merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sehubungan dengan membuat dan memutuskan pilihan.

Secara etimologis Konseling berasal dari kata counseling (bahasa inggris). Konseling adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada individu (siswa) dengan tatap muka (*face to face*) melalui wawancara. *Face to face* (hubungan timbal balik) dan wawancara ini merupakan ciri konseling. Umumnya konseling diberikan secara individual, namun sebenarnya bisa pula diberikan secara kelompok (bersama-sama). Pelayanan konseling

ditunjukkan kepada individu yang terlanjur bermasalah.<sup>9</sup> Dalam bahasa inggris Bimbingan Konseling adalah “*guidance*” dan “*counseling*”. Kata *guidance* berasal dari kata “*guide*” yang berarti “mengarahkan, memandu, mengelola dan menyetir.”<sup>10</sup> Sedangkan *counseling* berasal dari bahasa latin yaitu, “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”.<sup>11</sup>

Menurut Tolbert yang dikutip dari prayitno mengatakan bahwa : “konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang yang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat.”<sup>12</sup>

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar client memecahkan kesulitannya.<sup>13</sup> Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan

---

<sup>9</sup> Elfi Mu’awanah, Rifa Hidayah, *Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2009). h. 55

<sup>10</sup> Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Remaja Rosda Kariya, 2005), h. 4

<sup>11</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 99

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 101

<sup>13</sup> Willis S. Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung : CV Alfabeta, 2007), h.

langsung tatap muka (secara perseorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengetasan masalah pribadi yang di derita konseli.<sup>14</sup> Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (client) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi client.<sup>15</sup>

Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan client karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara bertatap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada diri client, baik cara berpikir, berperasaan, sikap dan perilaku.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling

Tujuan umum konseling adalah membantu client menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar client bisa

---

<sup>14</sup> Hellen. *Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), h. 84

<sup>15</sup> Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 105

<sup>16</sup> Holipah, The Using Of Individual Counseling Service to Improve Student's Learning Atitude And Habit At The Second Grade Student of SMP PGRI 6 Bandar Lampung. *Journal Counseling*, 2011



mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.<sup>17</sup>

Lebih lanjut prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling dalam empat hal yakni; fungsi pemahaman, fungsi pengetasan, fungsi mengembangkan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan dan fungsi advokasi.<sup>18</sup>

#### a) Fungsi Pemahaman

Bimbingan merupakan suatu usaha bantuan yang diberikan secara terus menerus dan sistematis oleh seorang pembimbing kepada siswa atau peserta didik. Pembimbing harus dapat memahami berbagai aspek yang menunjang dan dapat membantu perkembangan siswa secara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta kepribadian yang ada. Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh layanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri client beserta permasalahannya oleh client sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu client, serta pemahaman tentang lingkungan client oleh client.

#### b) Fungsi Pencegahan

Usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi layanan ini yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Hal tersebut dapat ditempuh melalui program bimbingan yang sistematis, sehingga hal-hal yang

---

<sup>17</sup> Prayitno. *Konseling Perorangan*. (Padang : Universitas Negeri Padang, 2005), h. 52

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 197

dapat menghambat seperti kesulitan belajar, masalah sosial, kekurangan informasi, dan sebagainya dapat terhindar.

c) Fungsi Pengentasan

Dalam kenyataan tidaklah mungkin anak terbatas dan kadang ia mengalami masalah atau kesulitan ringan atau berat. Dalam berbagai masalah itu anak belum tentu dapat memecahkan permasalahan yang ia hadapi walaupun itu hanya masalah ringan apalagi masalah yang sangat berat dan komplisit permasalahannya. Dalam hal ini fungsi pengentasan membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

d) Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Seluruh potensi yang dimiliki seseorang itu perlu dikembangkan agar petensi itu dapat berkembang sesuai yang diharapkan dan seoptimal mungkin.

Seseorang perlu mendapatkan beberapa hal, diantaranya ada dorongan atau motivasi dari pihak lain, seperti dari keluarga, fasilitas maupun dari guru pembimbing. Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari konseling, yakni :<sup>19</sup>

1. Tujuan perkembangan yakni client dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembanganya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi,emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya).

---

<sup>19</sup> Hibana Rahman S. *Bimbingan dan Konseling Pola*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h. 85

2. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu client menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakn sudah baik
6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif
7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat
8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

### **3. Proses Layanan Konseling**

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Menurut Brammer, “proses konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan member maksan bagi peserta konseling tersebut (konselor dan

client).<sup>20</sup> Setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling tidak mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor client) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan:<sup>21</sup>

#### 1. Tahap Awal Konseling

Tahap ini sejak client menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah client atas dasar isu, kepedulian, atau masalah client. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut:

##### 1. Membangun hubungan konseling yang melibatkan client

Hubungan konseling bermakna ialah jika client terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working relationship*, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna dan berguna. Kunci keberhasilan ditentukan oleh keterbukaan konselor, keterbukaan client dan konselor mampu melibatkan client terus menerus dalam proses konseling.

##### 2. Memperjelas dan mendefinisikan masalah

---

<sup>20</sup> Willis S. Sofyan. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. (Bandung : CV Alfabeta, 2007), h. 50

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 51

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana client telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan client akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada client. Sering client tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah client. Demikian pula client tidak memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselor lah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

3. Membuat penafsiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan yaitu, dengan membangkitkan semua potensi client, dan dia menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

4. Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan client. Hal itu berisikan kontrak waktu, artinya beberapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh client dan apakah konselor tidak keberatan, kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya dan client apa pula, kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan client dan konselor, artinya mengandung makna bahwa



konseling adalah urusan yang saling ditunjak, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli.

## 2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi client yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah client, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah client. Menilai kembali masalah client akan membantu client memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri client menuju perubahan. Tanpa perspektif maka client sulit berubah, adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu :

- a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian client lebih jauh, konselor berusaha agar clientnya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan client, artinya masalah itu di nilai secara bersama-sama.
- b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara, hal ini bisa terjadi karena pertama, client merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan

masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dan member bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu client menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

- c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak, kontrak di negosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu : pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar client selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka client sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang client sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.

### 3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

1. Menurunnya kecemasan client. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.

2. Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
3. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
4. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi client sudah berfikir realistik dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut :

- a. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadahi , Client dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikanya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. Saat ini dia sudah berpikir realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang ia inginkan.
- b. Terjadinya transfer of learning pada diri client, Client belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya,

client mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

- c. Melaksanakan perubahan perilaku, Pada akhir konseling client sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.
- d. Mengakhiri hubungan konseling, Mengakhiri konseling harus atas persetujuan client. Sebelum ditutup ada beberapa tugas client yaitu : pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalanya proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.

#### **4. Indikator Keberhasilan Konseling**

- a. Menurunnya kecemasan client
  - b. Mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis dan berguna
  - c. Harus ada perjanjian kapan rencananya akan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah berhasil mengecek hasil rencananya.
- Mengenai mengevaluasi, terdiri atas beberapa hal yakni; client menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya, client menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya, dan client menilai proses dan tujuan konseling.

#### **5. Kegiatan Pendukung Konseling**

Sebagaimana layanan-layanan lain, konseling individu juga memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung layanan konseling

individu adalah : aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.<sup>22</sup> *Pertama*, aplikasi instrumentasi. Dalam layanan konseling individu, hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil tes, hasil ujian, hasil AUM (Alat Ungkap Masalah), sosiometri, angket dan lain sebagainya dapat dijadikan konten (isi) yang diwacanakan dalam proses layanan konseling individu. *Kedua*, himpunan data. Seperti halnya hasil instrumentasi, data yang tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan untuk memanggil siswa juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam layanan konseling individu. Selanjutnya, data proses dan hasil layanan harus didokumentasikan di dalam himpunan data. *Ketiga*, konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang lain, konferensi kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang client untuk memperoleh dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak terutama pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah client. Konferensi kasus bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah dilaksanakanya layanan konseling individu. Pelaksanaan konferensi kasus setelah layanan konseling individu dilakukan untuk tindak lanjut layanan. Kapanpun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi client harus tetap terjaga dengan ketat.

---

<sup>22</sup> Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 164



*Keempat*, kunjungan rumah. Bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang client. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan dan kerja sama dari orang tua dalam rangka mengentaskan masalah client. Kunjungan rumah juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah layanan konseling individu. *Kelima*, alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami individu menjadi kewenangan konselor.

## 6. Konseling dalam Islam

Dalam literatur bahasa arab kata konseling disebut *al-irsyad* atau *al-istisyarah*, dan kata bimbingan disebut *at-taujih*. Dengan demikian, *guidance and counseling* dialihbahasakan menjadi *at-taujih wa al-irsyad* atau *at-taujih wa al-istisyarah*.<sup>23</sup> Secara etimologi kata *irsyad* berarti : *al-huda* dalam bahasa indonesia berarti petunjuk, kata *al-irsyad* banyak ditemukan di dalam Al-qur'an dan Hadis. Sebagai makhluk bermasalah, di depan manusia telah terbentang berbagai *solution* (pemecahan, penyelesaian) terhadap problem kehidupan yang dihadapinya. Namun karena tidak semua problem dapat diselesaikan oleh manusia secara mandiri, maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Dalam hal ini, kesempurnaan ajaran islam menyimpan *khazanah-khazanah* berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan *problem* kehidupan manusia. Secara operasional *khazanah-khazanah* tersebut tertuang dalam konsep konseling dan secara praktis tercermin dalam proses *face to face relationship* (pertemuan tatap

---

<sup>23</sup> Lubis Akhyar Saiful. *Konseling Islami*. (Yogyakarta : Elsaq Press, 2007), h. 79

muka ) atau *personal contac* (kontak pribadi) antara seorang konselor profesional dan berkompeten dalam bidangnya dengan seorang client/konseli yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan problem kehidupannya, untuk mewujudkan amanah ajaran islam, untuk hidup secara tolong menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan dan memberi masihat untuk kebaikan menjauhi kemungkaran. Hidup secara islami adalah hidup yang melibatkan terus menerus aktivitas belajar dan aktivitas konseling (memberi dan menerima nasihat).<sup>24</sup>

Islam memandang bahwa client atau konseli adalah manusia yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan berupaya mencari kemantapan diri sendiri, sedangkan Rogers yang tidak lain adalah salah satu tokoh psikologi memandang bahwa dalam proses konseling orang paling berhak memilih dan merencanakan serta memutuskan perilakudan nilai-nilai mana yang dipandang paling bermakna bagi client atau konseli itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 142

### **C. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

#### **1. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban berbunyi : “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”<sup>26</sup> Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan identik dengan perbuatan melukai orang

---

<sup>26</sup> UU No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Bab I pasal I (online) di <https://www.komisiinformasi.go.id>, diakses pada 07 September 2018 pukul 09:08 WIB.

lain dengan sengaja, membunuh orang lain, dan memperkosa, kekerasan seperti ini sering disebut kekerasan langsung (*direct violenc*)<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga (PKDRT), bahwa yang dimaksud dengan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>28</sup> Dari pengertian diatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selaras dengan pendapat beberapa ahli, menurut Mansour Fakih “Kekerasaan dalam rumah tangga adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikolog seseorang.”<sup>29</sup> Untuk mengklasifikasikan uraian berdasarkan pengertian diatas, bahwa diatara yang termasuk dalam lingkup

---

<sup>27</sup> Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.284

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 284

<sup>29</sup> Mansour Fakih (1953-2004) tokoh Pendukung sistem gerakan sosial, kelahiran Bojonegoro, Sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978), meraih gelar Master dan Doktor bidang Pendidikan di Universitas Of Massachusetts at Amherst USA tahun 1990 dan 1994. Beliau bersama Sembilan sahabatnya di Jakarta mendirikan Lembaga Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pengembangan Kemampuan Organisasi-Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat. Semasa hidup beliau mengabdikan diri untuk berkecimpung dan menjabat di berbagai Lembaga-Lembaga sosial lainnya diantaranya YLKI, P3M, LSP dll.

keluarga menurut UU PKDRT no 23 tahun 2004 adalah:<sup>30</sup>

- a. Suami istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan, perkawinan, persusun, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

## 2. Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengenai penyebab dari KDRT yang selama ini terjadi mungkin relatif berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya. Menurut *Strauss A. Murray* Mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Fakta menunjukan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

---

<sup>30</sup> Utsman Ali, "apa itu KDRT" (online) di <http://www.Pengertianpakar.com> (14 November 2014), diakses pada 09 September 2018 pada 09:19 WIB.

<sup>31</sup> Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 204-205.

- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan damai. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- c. Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami, akibatnya istri sering di perlakukan semena kehendak suami.
- d. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Anggapannya masalah urusan rumah tangga orang lain tidak layak mencampurinya.
- e. Pemahaman keliru dalam memahami ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang di anugerahkan tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.



### 3. Gejala-gejala Kekerasan dalam Rumah Tangga

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala- gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

### 4. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tercantum dalam pasal 7, 8, 9 yaitu; tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan kedalam empat macam:<sup>32</sup>

- a. Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan Psikis, Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut,

---

<sup>32</sup> Moerti Hadiati Soerroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 83

hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.

- c. Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
- d. Kekerasan Ekonomi, Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

## 5. Dampak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Seorang Perempuan ibu rumah tangga (istri) merupakan korban utama dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan yang dialami korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, diantaranya sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Jatuh sakit akibat stress seperti sakit kepala,perut dll.
- b. Depresi dan kecemasan hingga sakit jiwa yang bias parah.
- c. Berkemungkinan melakukan bunuh diri.
- d. Berkemungkinan keguguran bagi korban yang sedang hamil.
- e. Rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah.
- f. Bagi ibu yang menyusui, ASI sering kal terhenti akibat tekanan bathin jiwa.
- g. Berkemungkinan melakukan tindakan kejam terhadap anak, akibat tidak dapat menguasai diri, penderitaan, dan tidak menemukan jalan keluar.

Dampak psikologis istri dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim (suami) dengan korban memiliki dampak jangka pendek dan panjang. Dampak jangka pendek korban diantaranya; marah-marah, merasa bersalah, malu, jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negative dan merasa hina) dampak jangka pendek tersebut mengakibatkan insomnia(susah tidur) dan kehilangan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 202

nafsu makan, serta siklus haid yang tidak baik.<sup>34</sup> Dampak jangka panjang kondisi secara psikologis korban yang sering terjadi secara berulang jika tidak ditolong yakni, mengenai sikap dan persepsi negative terhadap laki-laki, banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan serta gangguan tingkat kesuburan akibat pergolakan batin.<sup>35</sup>

Seorang istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga masih banyak yang kecenderungan diam dan menutup diri karena berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya serta adanya ketakutan yang akan dialami jika melaporkan kejadian yang menimpa dirinya maka justru akan semakin berkepanjangan masalahnya tersebut. Penyebab kecenderungan korban (*istri*) memilih diam disebabkan beberapa alasan :<sup>36</sup>

- a. Ketidaktahuan istri sebagai korban mengenai prosedur pelaporan kekerasan yang dialaminya melalui hukum. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT.
- b. Masih terdapat anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah aib yang perlu ditutupi.
- c. Kurang kepedulian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>34</sup> M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang" *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol. 11, No. 2 (April 2016), h. 189

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 190

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 207

- d. Tidak adanya keyakinan dalam diri korban bahwa kasusu kekerasan akan ditangani secara adil. Korban kurang percaya terhadap hukum yang ada.

## **6. Hak dan Kewajiban Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga**

Bagi siapa saja setiap kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang sosial, politik, budaya, sipil dan kebebasan asasi yang sama dalam hal bidang-bidang lainnya, hak-hak tersebut diantaranya.<sup>37</sup>

- a) Hak atas kehidupan
- b) Hak atas persamaan
- c) Hak kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d) Hak perlindungan yang sama dimuka umum
- e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa Negara wajib melakukan langkah-langkah tindak tepat untuk menghapus segala diskriminasi terhadap perempuan di semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan yakni termaktub dalam UU RI No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/wanita, Pasal 16 Poin C dan G, menyebutkan bahwa : “Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan, serta hak pribadi yang sama sebagai suami istri termasuk nama keluarga, profesi

---

<sup>37</sup> Tapi Omas Irhani, Sulistyowati Irianto, Achis Sudiarti Luhutimas. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. (Bandung : Alumn, 2006), h. 389

dan jabatan.”<sup>38</sup> Sebagai seorang korban, juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, keberadaan hak dan kewajiban korban semakin di hormati, hak selaku korban KDRT dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan sesuai perlindungan dalam pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Secara umum hak korban disebutkan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Korban berhak menolak atau mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk wali warisnya jika korban

---

<sup>38</sup> M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang” *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol. 11, No. 2 (April 2016), h. 380-381

<sup>39</sup> Mohammad Taufik Makarao Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 199

<sup>40</sup> Moerti Hadiati Soerroso. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h 115



meninggal dunia karena tindakan tersebut.

- c. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- e. Korban berhak mendapatkan perlindungan bila mendapatkan ancaman dari pelaku jika melapor dan menjadi saksi.
- f. Korban berhak mendapatkan bantuan penasehat dan upaya hukum.

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Korban tidak main hakim sendiri
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
- 4) Wajib ikut serta membina pelaku.
- 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai kemampuan pelaku.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 116

## D. Pendampingan Psikologis dan Pendampingan Advokasi

### 1) Pendampingan Psikologis

Pendampingan adalah suatu aktifitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan yakni tertuju pada proses hubungan sosial antara seorang pendamping dengan korban sejajar, yang didampingi dengan pendamping posisinya tidak ada kata atasan atau bawahan.<sup>42</sup> Istilah pendampingan juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT Bab I Pasal 1 : “Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.”<sup>43</sup> Selaras dengan pendapat Bambang Waluyo dalam bukunya “*viktimologi perlindungan saksi dan korban*” bahwa bantuan psikologi adalah bantuan yang diberikan oleh konselor/psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Sosial RI, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. (Jakarta: Direktorat Jendral, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2007), h. 10

<sup>43</sup> Prayudi Guse, *Berbagai Aspek-Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Merkid Press, 2015), h. 193

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), h. 42

## 2) Pendampingan Advokasi

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, tidak ditemukan tentang arti advokasi, yang ada hanya advokat. Advokat merupakan ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dipengadilan; pengacara.<sup>45</sup> Kaminski dan Walmsley menjelaskan bahwa advokasi adalah satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa diantaranya mendefinisikan advokasi adalah suatu tindakan yang ditunjukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas program dari suatu instansi.<sup>46</sup> Sedangkan Zastrow memberikan pengertian advokasi sebagai aktivitas menolong client untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu system layanan, dan membantu memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Sheila Espine-Villaluz berpendapat bahwa advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukan suatu masalah (isu) ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan public yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Desi Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. (Surabaya: Amelia, 2003), h. 17

<sup>46</sup> <http://www.pengertiandefinisi.com/2012/03/pengertian-advokasi.html>. Online, diakses pada 14 Desember 2018.

<sup>47</sup> *Ibid*

## E. Tinjauan Pustaka

1. Irma Mar'atun Hasanah, 2015, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan judul “Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.”<sup>48</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma menjelaskan bahwa manajemen pelayanan sosial yang selama ini dilakukan UPT Panti Wredha Budhi Dharma sudah menemui 7 fungsi manajemen dalam *Management of Human Service* namun belum sepenuhnya mencapai tujuan panti dalam mensejahterakan para lansia, terutama kesejahteraan secara batin. Hal ini dilihat dari fungsi manajemen sumber daya manusia seperti pekerja sosial dan fungsi supervise yang belum terlaksana secara optimal. Sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran dengan teori pendekatan konseling, adapun permasalahan yang diangkat juga berbeda. Dalam skripsi ini mengangkat isu perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Ragil Purnomo, 2015, Jurusan Manajemen Dakwah dengan judul “Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji (Studi Kasus Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo of City Musim Haji Tahun 2015).”<sup>49</sup> Pada penelitian ini dilakukan oleh Ragil menjabarkan tentang

---

<sup>48</sup> Irma Mar'atun Hasanah. Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta. *Skripsi*. (Yogyakarta : Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2015)

<sup>49</sup> Sri Maryati, Manajemen Pelayanan Jama'ah Haji Kantor Departemen Agama Kotamadya Yogyakarta. *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

proses manajemen pelayanan calon jamaah haji ketika pertama kali masuk di Embarkasi Asrama Haji Donohudan Boyolali pada musim haji tahun 2015. Sedangkan pada penelitian ini menjabarkan pengelolaan pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

3. Maulida Faizatul Lathiefah, 2013, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang berjudul “Manajemen Bimbingan dan Konseling di MAN Maguwaharjo Depok Sleman Yogyakarta” menggambarkan tentang penerapan fungsi fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, dalam karya tulis tersebut memaparkan pola dan model organisasi bimbingan dan konseling di MAN Maguwaharjo Depok Sleman Yogyakarta.<sup>50</sup> Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada sasaran dan tempat yang diteliti. Pada penelitian tersebut, sasarannya adalah siswa MAN Maguwaharjo Depok Sleman Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini adalah penanganan terhadap korban kekerasan rumah tangga di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.

Dari ketiga penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung. Penelitian ini

---

<sup>50</sup> Maulida Faizatul Lathiefah. Manajemen Bimbingan dan Konseling di MAN Maguwaharjo Depok Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. (Yogyakarta : Bimbingan dan Konseling Islam, 2013)

berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban KDRT di P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung.





**BAB III**  
**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK (P2TPA)**  
**KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**

**A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

**1. Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran di dirikan pada 17 Oktober 2016 yang di bentuk langsung atas keputusan Bupati Pesawaran yakni H. Dendi Ramadhona, ST . Pusat pelayanan perempuan dan anak kabupaten pesawaran adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas perempuan serta melindungi anak dari tindakan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan dan anak, pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak dibagi dalam tiga pokok bidang, yakni;<sup>1</sup>

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2. Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Perempuan
3. Bidang Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anak

Latar belakang pembangunan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak adalah sistem pembangunan di kabupaten yang mengintegrasikan

---

<sup>1</sup> Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak menuju terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas. Perubahan lingkungan strategis serta tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat telah mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesawaran.

## **2. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Adapun visi dan misi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran, yakni;

### **A. Visi**

Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan gender dan perlindungan anak menuju pesawaran yang maju, makmur dan sejahtera.

### **B. Misi**

1. Mewujudkan peningkatan keterbukaan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan public
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan produktifitas ekonomi perempuan
3. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender

4. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
6. Meningkatkan koordinasi antar lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak

### **3. Landasan Hukum Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Adapun landasan hukum pelaksanaan program pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran, antara lain;<sup>2</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

---

<sup>2</sup> Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Ilo No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749 )
  19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
  21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);



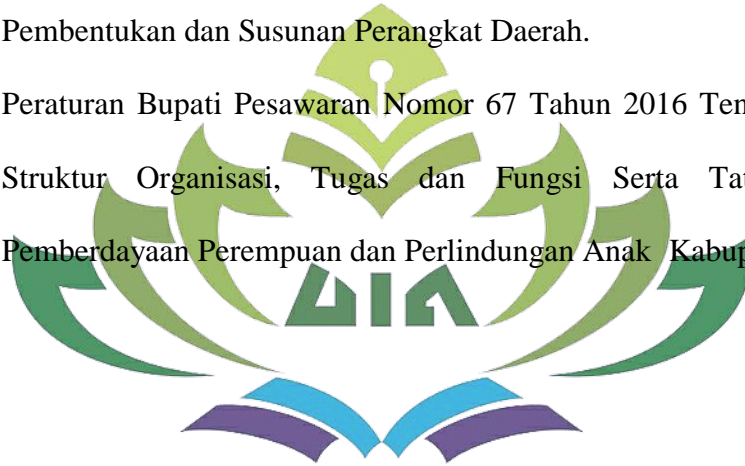
22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
27. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

40. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

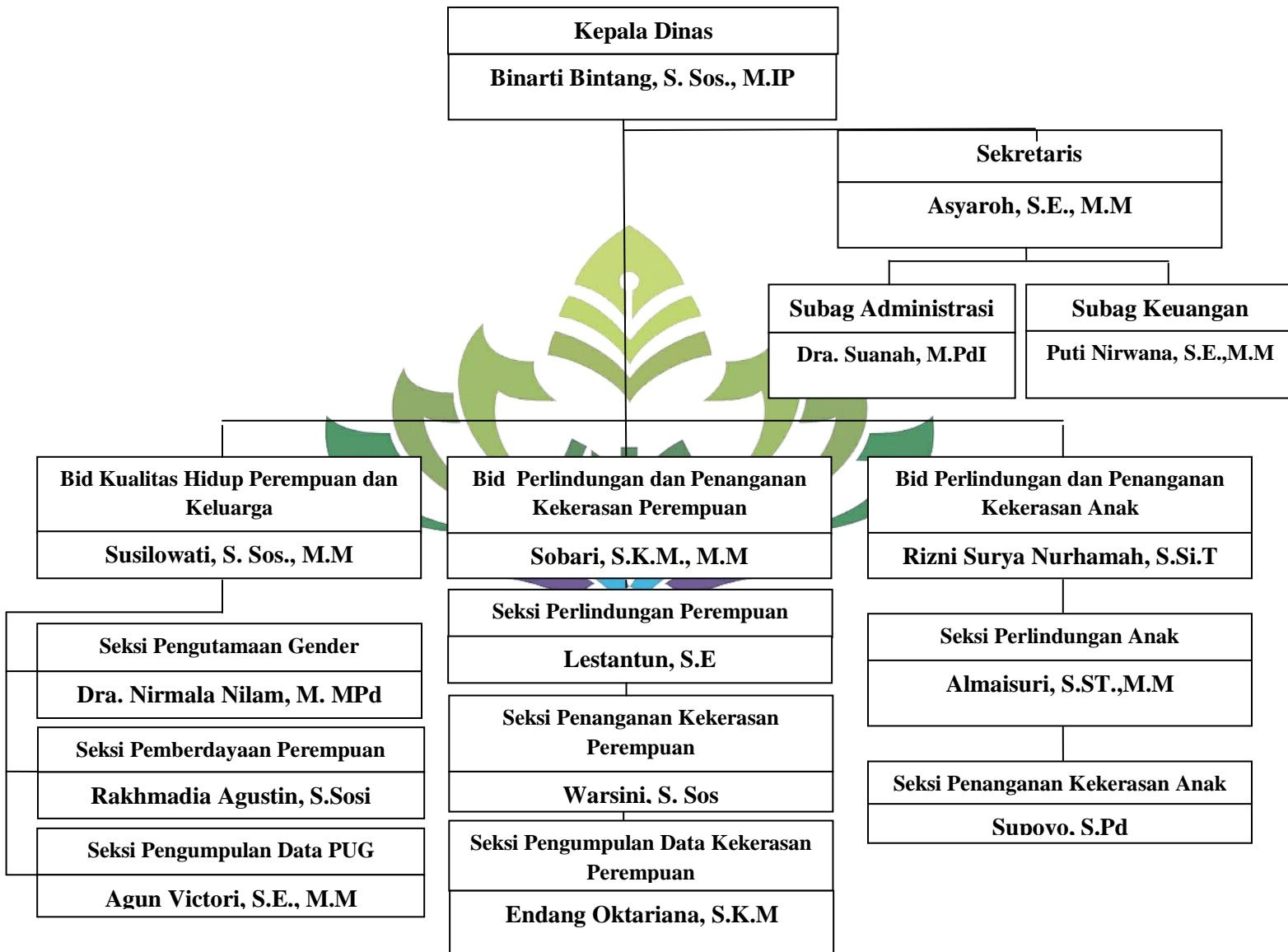
46. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
49. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.



#### 4. Struktur Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

##### Kabupaten Pesawaran Lampung

Gambar 1  
Bagan Struktur Organisasi<sup>3</sup>



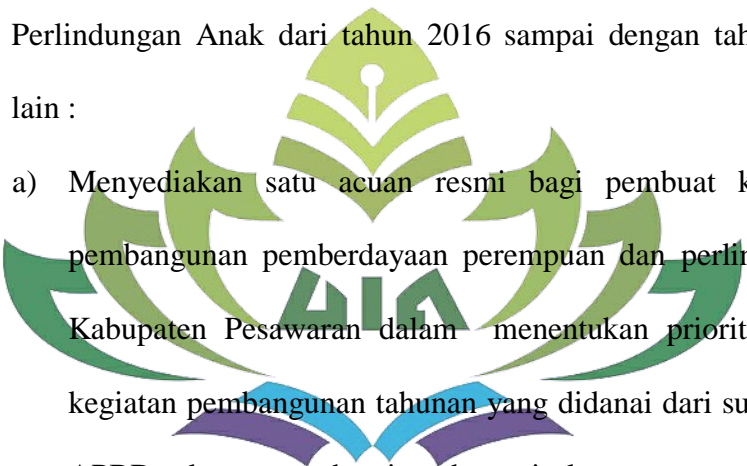
<sup>3</sup> Struktur Organisasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung



**B. Program Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak  
Kabupaten Pesawaran Lampung dan Realisasinya**

**1. Program Kegiatan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesawaran yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, antara lain :

- 
- a) Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesawaran dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang didanai dari sumber pendanaan APBD dan memahami substansi kewenangan konkuren yang diemban dan mensinergikan dengan tugas dan fungsi
  - b) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesawaran dan mensinkronisasikan, mengintegrasikan dokumen renstra pemerintah daerah dengan dokumen renstra kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum di Kabupaten Pesawaran saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati Pesawaran dan 9 agenda prioritas Presiden yang dikenal dengan Nawa Cita
- d) Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesawaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan memperjelas konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah dan program serta anggaran tahunan
- e) Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesawaran untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dan meningkatkan kualitas dokumen renstra dan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

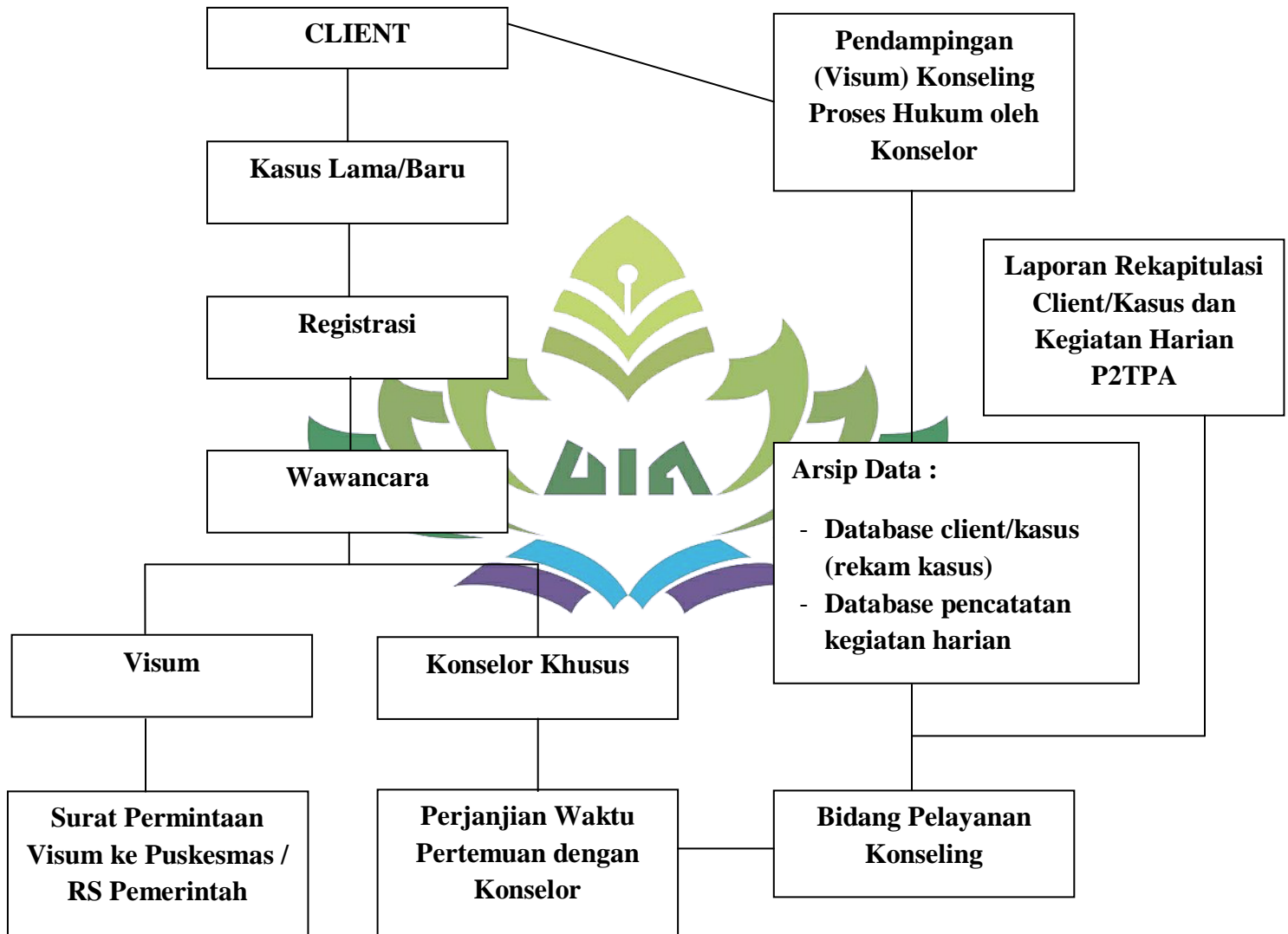
## 2. Realisasi Hasilnya

- a) Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran telah menjalankan fungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak.

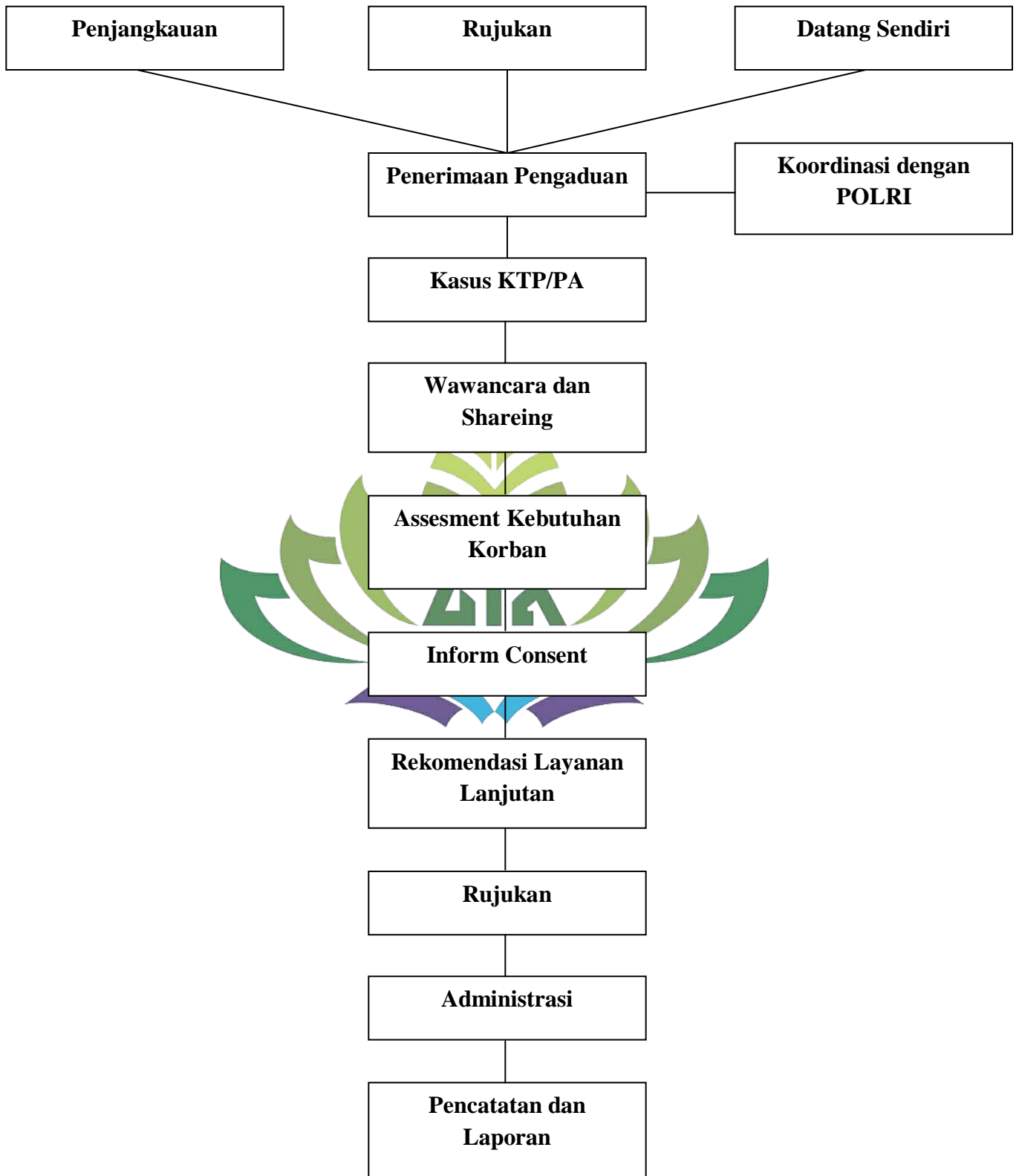
- b) Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran telah menjalankan fungsi sebagai pusat layanan (layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial) bagi perempuan dan anak.
- c) Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran telah menjalankan fungsi sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.
- d) Terbentuknya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kepala desa, anggota badan perwakilan desa dan keikutsertaan perempuan dalam organisasi-organisasi perangkat desa.
- e) Terbentuknya gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang berbasis pada organisasi-organisasi perempuan di desa dan kabupaten pesawaran.
- f) Terbangunnya kesadaran kritis perempuan untuk mengorganisir diri dalam rangka memperkuat gagasan perempuan untuk terlibat dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan.

**C. Mekanisme Alur Pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Gambar 2  
Alur Penanganan Korban<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Data Alur Penangan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung



**D. Gambaran Keseluruhan Client/Konseli Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Tabel 1

**DATA KASUS PEREMPUAN  
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN  
DINAS P2TPA KABUPATEN PESAWARAN**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tindakan Kekerasan yang di Alami						
			Fisik	Seksual	Psikis	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	dll
1	2017	4	4		3				
2	2018	4	2	1					1
3	2019								
4	2020								
5	2021								

*Sumber :Data Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung*

**E. Metode Pendampingan Kasus Pada Korban dan Pelaku KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

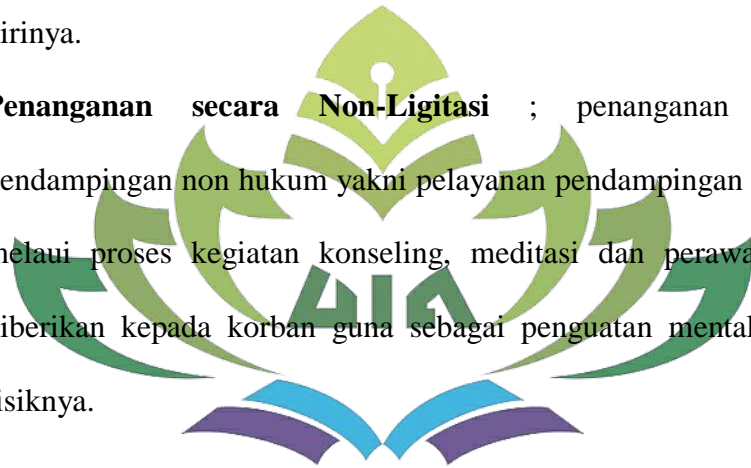
Adapun bentuk penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yakni, pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran menetapkan layanan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling sebagai penanganan dalam membantu client, dalam hal tersebut pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran menyediakan atau membantu penanganan kasus kepada korban untuk diproses lanjut secara hukum/ligitasi yaitu pendampingan advokasi dan secara konseling/non-ligitasi yaitu pendampingan psikologis terhadap korban seperti yang disampaikan oleh



Bapak Sobari, S,K.M.,M.M ; “pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran lampung dalam kegiatan program pelayanan selain memberikan pendampingan advokasi hukum dan pendampingan konseling.”

**1. Penanganan secara Ligitasi** ; penanganan secara ligitasi yaitu pendampingan secara advokat kejalur hukum dan kepolisian, korban didampingi untuk menindak lanjuti proses kasusnya di kepolisian bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga atas apa yang menimpa dirinya.

**2. Penanganan secara Non-Ligitasi** ; penanganan kasus melalui pendampingan non hukum yakni pelayanan pendampingan secara psikologis melalui proses kegiatan konseling, meditasi dan perawatan medis yang diberikan kepada korban guna sebagai penguatan mental, psikologis dan fisiknya.



**BAB IV**

**MANAJEMEN PELAYANAN KONSELING TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG**

**A. Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak Kabupaten Pesawaran adalah suatu lembaga yang menampung serta memberdayakan hak-hak perempuan dalam keluarga maupun sosial masyarakat, banyaknya perempuan dan istri yang telah mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi serta ketidakadilan dalam rumah tangga dapat dilihat dan diamati melalui lembaga yang menaunginya yakni pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak Kabupaten Pesawaran Lampung.

Perempuan dalam rumah tangga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya serta seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi, sehingga perempuan membutuhkan bantuan baik secara psikis, psikologis, spiritual, serta moril dan bantuan secara hukum untuk dapat menjalani dan merasakan kehidupan dengan tentam dan nyaman serta memperoleh keadilan yang sama dalam lingkup keluarga serta lingkungan

sosialnya. Dengan semakin berdayanya perempuan selaku seorang istri yang mempunyai peranan penting dalam keluarga tentu diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sebagai ibu rumah tangga dan mampu membangun keharmonisan dalam lingkup keluarga, serta menjadi madrasah pertama untuk tumbuh kembang sang buah hati, karena kebahagiaan keluarga adalah adanya hubungan timbal balik dengan saling menjaga serta mampu menutupi segala kekurangan pasangannya. Berikut ini adalah manajemen pelayanan korban dalam mendapatkan pelayanan serta pendampingan baik secara psikologis maupun advokasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung, Persiapan pelaksanaan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan adanya:

A. Proses Pelaksanaan Pendampingan Psikologis

1. Client: rujukan keluarga/orang terdekat korban yang menghubungi ataupun datang sendiri ke Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran melaporkan atas kejadian yang telah menimpanya.
2. Kasus lama/baru: membuka database korban, apakah korban termasuk dalam kasus lama yang telah ditangani dan kembali berulah melakukan kesalahan atau kasus baru yang belum pernah diproses oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Kemudian dilanjutkan dengan proses registrasi yakni, mengisi data data korban untuk

dimasukkan ke dalam database pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak.

3. Wawancara: dilaksanakan sesi visum apabila ditubuh korban terdapat luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami/kerabat terdekatnya, apabila terdapat luka/memar pada tubuh korban dirujuk untuk dimintai visum ke rumah sakit pemerintah sebagai tanda bukti visum akibat kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya akan diarahkan untuk pertemuan dengan konselor untuk memulihkan trauma akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada korban.

Kemudian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran menjelaskan dan memberitahukan terlebih dahulu serta menawarkan kepada korban untuk didampingi secara advokat melalui jalur hukum atau secara pendampingan psikologis melalui kegiatan konseling dan meditasi saja. Dalam penanganan kasus, apapun yang akan dilakukan terhadap kasus yang dialaminya adalah keputusan yang diambil oleh korban itu sendiri, selanjutnya konselor selaku pendamping hanya memberitahukan kepada korban tentang informasi, resiko dan kejadian yang mungkin akan terjadi setelah pengambilan keputusan.

#### B. Proses Pelaksanaan Pendampingan Advokasi

1. Pengajuan: adanya laporan yang diajukan oleh pihak keluarga korban/pihak-pihak berwajib yang berwenang didesa ataupun

kabupaten yang melaporkan tindak kekerasan yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan terhadap Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesawaran.

2. Rujukan: adanya rujukan korban dari rumah sakit ataupun kepolisian, lalu diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran untuk ditindak lanjuti dan segera ditangani kasusnya.
3. Datang Sendiri: adanya korban/keluarga yang menghubungi ataupun datang sendiri ke Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran, melaporkan atas kasus/kejadian yang telah menimpanya.
4. Penerimaan pengajuan: tahapan penerimaan pengajuan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib, sebagai bentuk penjagaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kasus KTP/PA, dan wawanca/shareing: keterbukaan korban terhadap konselor atas kasus/kejadian yang telah menimpanya agar konselor dapat memlihkkan serta mengarahkan kebutuhan korban terhadap hak-haknya dan bertujuan dalam mempercepat pemulihan korban akibat kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban.

6. *Inform consent*: persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.
7. Rekomendasi layanan lanjutan: rujukan untuk melanjutkan ketahap pencatatan dan pelaporan kepada pihak berwajib.

Berbagai upaya pelayanan dan kemudahan yang diberikan dan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran terhadap client korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memudahkan pelayanan dan disesuaikan dengan kebutuhan client agar hak keamanan maupun kenyamanan korban dapat terpenuhi. Client korban kekerasan dalam rumah tangga pada adalah perempuan mereka berjuang mempertahankan dan menginginkan kebahagiaan anak-anaknya secara utuh bersama dengan keluarga yang utuh dengan adanya ayah serta ibu. Dalam pelayanan pendampingan advokasi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran memprioritaskan agar client atau korban memperoleh hak nya dan terpenuhi rasa keamanan dan kenyamanan dan tidak mengalami trauma akibat kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi menimpa korban atau konseli.

**B. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Konseling Bagi Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

**1) Faktor Pendukung**

Faktor pendukung di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni: Penanganan Komprehensif, penanganan komprehensif adalah pelayanan yang menyeluruh meliputi upaya preventif, kuratif, promotif, serta rehabilitative bagi masyarakat yang membutuhkan. Penanganan Komprehensif dibagi menjadi dua, yakni; intern dan ekstern.

- a) Penanganan komprehensif intern yaitu adanya kerjasama yang baik antar bidang pelayanan mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologis, pelayanan hukum, sampai pada pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sehingga penanganan suatu kasus tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antar pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain.
- b) Penanganan komprehensif ekstern yaitu adanya kerjasama berjejaring dalam wadah forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA), sehingga dalam menangani suatu kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung bekerjasama dengan berbagai



pihak terkait yang terhubung dalam forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA) dengan adanya kerjasama yang baik antar instansi atau jejaring yang terlibat dalam upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

- 2) Faktor Penghambat, adapun faktor yang menjadi penghambat serta kendala dalam pelaksanaan manajemen pelayanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung adalah sumber daya manusia, pegawai serta petugas yang masih kurang sehingga dalam menangani kasus masih kurang optimal, serta sarana dan prasarana yang masih kurang, diharapkan pemerintah setempat yakni Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat berkontribusi untuk memenuhi sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menuntut hak-haknya sebagai seorang istri dan memiliki hubungan kekeluargaan yang harmonis, serta dapat menjadi madrasah terbaik untuk sang buah hati. Client yang beraneka ragam, karakter serta latar belakang hidup yang berbeda-beda serta berbagai macam faktor eksternal (keluarga dan lingkungan) yang mampu mendorong perubahan pada kelangsungan maupun perkembangan korban baik secara psikis dan non-psikis.

Tabel 2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	0	0	0	0
3	D3	0	0	0	0	0
4	S1	1	5	0	0	6
5	S2	2	10	0	0	12
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah						18

Tabel 3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran Lampung

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	0	0
2	Golongan III	3	7	10
3	Golongan IV	1	7	8
Jumlah				18

Tabel 4  
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi  
di Dinas P2TPA Kabupaten Pesawaran

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah			
Kendaraan							
Minibus (inova)	1	0	0	1	1	1	1
Minibus (luxio)	1	0	0	1	1	0	1
Sapras Elektronik							
Komputer	1	0	1	2	8	6	0
Printer	2	0	0	2	6	4	0
Sapras Kantor							
Meja	25	0	0	25	30	5	0
Kursi	25	0	0	25	30	5	0
Sapras Rumah Aman							
Tempat Tidur	1	0	0	1	2	1	0
Kasur	1	0	0	1	2	1	0
Kipas Angin	1	0	0	0	2	1	0
Kompor Gas	1	0	0	0	2	1	0
Televisi	1	0	0	0	2	1	0
Magicom	1	0	0	0	2	1	0

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan merupakan wujud pemberdayaan dalam upaya membantu memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami beban secara psikologis, psikis dan mental yang mungkin kurang sehat karena diakibatkan dari tindakan kekerasan yang menimpanya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak mempunyai manajemen pelayanan yang jelas serta telah ditata dengan peraturan yang berlaku, pelayanan serta pendampingan bagi para korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dibagi oleh dua alur pendampingan yakni, pendampingan secara psikologis dan pendampingan secara advokasi.
2. Faktor pendukung dalam kegiatan manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni penanganan komprehensif secara intern dan ekstern, sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yakni, sumber daya manusia dalam pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak yang masih kurang, serta fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim dalam

menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya dari perilaku diskriminasi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut ini;

### 1. Saran untuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung

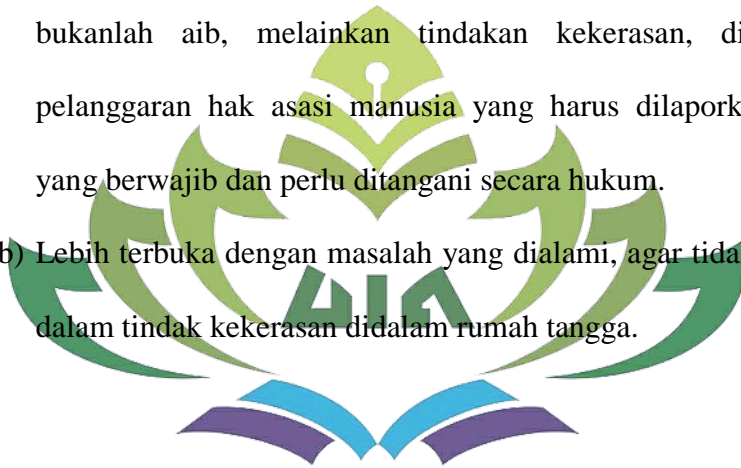
- a) Diharapkan dalam lembaga swadaya masyarakat seperti pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak menyiapkan serta menambah sumber daya manusia sehingga dapat menangani semua kasus-kasus pengaduan para korban.
- b) Diharapkan dari pihak pemerintah daerah pesawaran memberikan bantuan serta dapat menyediakan segala bentuk fasilitas agar dapat menunjang segala proses pelayanan sosial.
- c) Diharapkan bagi ketua rt/rw serta kepala desa setempat dapat ikut berkontribusi untuk melaporkan kepada lembaga P2TPA apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga disekitar daerahnya.
- d) Diharapkan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga jangan ragu untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga agar korban mendapatkan hak-haknya dari perilaku diskriminasi lingkungan keluarga maupun sosialnya.

2. Saran untuk Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

- a) Diharapkan untuk segera terealisasi Laboratorium BKI yang sudah lama sekali dinantikan oleh semua mahasiswa/i BKI sebagai tempat latihan konseling maupun konsultasi

3. Saran untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a) Menyadari bahwa perilaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah aib, melainkan tindakan kekerasan, diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan perlu ditangani secara hukum.
- b) Lebih terbuka dengan masalah yang dialami, agar tidak menjadi korban dalam tindak kekerasan didalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Rafika Aditama.
- Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Elfi Mu'awanah, Rifa Hidayah, 2009. *Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Fajar Santoadi. 2010. *Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Hellen. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Quantum Teaching.
- Holipah, 2011. The Using Of Individual Counseling Service to Improve Student's Learning Atitude And Habit At The Second Grade Student of SMP PGRI 6 Bandar Lampung. *Journal Counseling*.
- Hibana Rahman S. 2003. *Bimbingan dan Konseling Pola*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Irma Mar'atun Hasanah. Manajemen Pelayanan Sosial Lanjut Usia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta. *Skripsi*. 2015. Yogyakarta : Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- Jalaludin Rahmat, 2000. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Latipun. 2011. *Psikologi Konseling*. Malang : UMM Press.
- Lubis Akhyar Saiful. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta : Elsaq Press.
- Malayu SP. Hasibuan. 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mansour Fakih (1953-2004 ) tokoh Pendukung sistem gerakan sosial, kelahiran Bojonegoro, Sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978), meraih gelar Master dan Doktor bidang Pendidikan di Universitas Of Massachusetts at Amherst USA tahun 1990 dan 1994. Beliau bersama Sembilan sahabatnya di Jakarta mendirikan Lembaga Pelayanan Fasilitasi dan Konsultasi Pengembangan Kemampuan Organisasi-Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat. Semasa hidup beliau mengabdikan diri untuk berkecimpung dan



menjabat di berbagai Lembaga-Lembaga sosial lainnya diantaranya YLKI, P3M, LSP dll.

Maulida Faizatul Lathiefah. Manajemen Bimbingan dan Konseling di MAN Maguwaharjo Depok Sleman Yogyakarta. *Skripsi*. 2013. Yogyakarta : Bimbingan dan Konseling Islam.

M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, Anila Umrina, “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT di LRC-KJHAM Semarang” 2016. *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol. 11, No. 2 April.

Mohammad Taufik Makarao Letkol Sus, Syaiful Azri, 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Moerti Hadiati Soerroso. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Pengawasan, (online) di  
<https://www.google.com/search?q=pengawasan+adalah&oq=pengawasan+&aqs=chrome..69i57j0l5.4750j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

Pengorganisasian, (online) di  
<https://www.google.com/search?q=pengorganisasian&oq=pengorg&aqs=chrome..69i57j0l5.6737j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

Perencanaan, (online) di  
<https://www.google.com/search?q=perencanaan+adalah&oq=perencanaan&aqs=chrome..69i57j0l2j69i65j0l2.4844j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

Pergerakan, (online) di  
<https://www.google.com/search?q=pergerakan+adalah&oq=pergerakan+adalah&aqs=chrome..69i57j0l5.6120j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada 27 Januari 2019 Pukul 20:49 WIB.

Prayitno dan Erman Amti. 1994. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prayitno. 2005. *Konseling Perorangan*. Padang : Universitas Negeri Padang.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rini Friastutu. “Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Selalu Meningkat Tiap Tahun”. <http://news.detik.com/berita/3035792/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-selalu-meningkat-tiap-tahun>. diakses pada tanggal 03 September 2018 pada pukul 11:28 WIB

Sedarmayanti, Syarifudin hidayat, 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Sri Maryati, Manajemen Pelayanan Jama'ah Haji Kantor Departemen Agama Kotamadya Yogyakarta. *Skripsi*. 2007. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Sutrisno Hadi, 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Cipta.

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2005. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Remaja Rosda Kariya.

Prayitno dan Erman Amti, 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* Jakarta: Rineka Cipta.

Tapi Omas Irhani, Sulistyowati Irianto, Achis Sudiarti Luhutimas. 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Bandung : Alumni.

Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. 2007. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1

Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo. Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Sosial Work Jurnal* Vol 6 No 1

UU No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Bab I pasal I (online) di <https://www.komisiinformasi.go.id>, diakses pada 07 September 2018 pukul 09:08 WIB

Utsman Ali, “apa itu KDRT” (online) di <http://www.Pengertianpakar.com> (14 November 2014), diakses pada 09 September 2018 pada 09:19 WIB.

Willis S. Sofyan. 2007. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung : CV Alfabeta.



**Wawancara dengan Bapak Sobari, S.K.M.,M.M Ketua Bidang Perlindungan dan  
Penanganan Kekerasan Perempuan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak  
Kabupaten Pesawaran Lampung**



**Wawancara dengan Ibu Asyaroh, S.E.,M.M selaku Sekretaris di Pusat Pelayanan Terpadu  
Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**



**Wawancara dengan Staf Bagian Pengumpulan Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga di  
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung**

